

## Tantangan implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kalimantan Barat: Kajian literatur

Fransisca Marito Sihombing<sup>1,\*</sup>, Rita Nian Jubata Mare<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

<sup>2</sup> Magister Manajemen Universitas Tanjungpura, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [sissihombing94@gmail.com](mailto:sissihombing94@gmail.com))

### Abstract

This study examines the challenges in implementing Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Enterprises (SAK EMKM) among MSMEs in West Kalimantan using a systematic narrative literature review method. The research systematically analyzes peer-reviewed journals, research reports, and relevant publications from academic databases to identify implementation barriers specific to the border region context. The main challenges identified include limited accounting knowledge among MSME owners, perceived complexity of standards, human resource and financial constraints, inadequate information technology infrastructure, and insufficient ecosystem support. The geographical characteristics of West Kalimantan, as a border region, combined with educational disparities and infrastructure limitations, create unique implementation barriers that have not been extensively addressed in previous studies. This study contributes to the literature by providing the first comprehensive analysis of SAK EMKM implementation challenges in Indonesia's border regions, offering contextual insights for the development of targeted intervention strategies. The findings recommend collaborative approaches involving multi-stakeholder partnerships in education, training, and infrastructure development, tailored to local contexts, to ensure the relevance and sustainability of implementation.

Keywords: SAK EMKM, MSMEs, West Kalimantan, Financial Reporting, Implementation Challenges.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kalimantan Barat menggunakan metode kajian literatur naratif sistematis. Penelitian secara sistematis menganalisis jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi relevan dari database akademik untuk mengidentifikasi hambatan implementasi spesifik konteks daerah perbatasan. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan pengetahuan akuntansi pelaku UMKM, persepsi kompleksitas standar, kendala sumber daya manusia dan finansial, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta kurangnya dukungan ekosistem. Karakteristik geografis Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan, disertai disparitas pendidikan dan keterbatasan infrastruktur, menciptakan hambatan implementasi unik yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur dengan memberikan analisis komprehensif pertama tentang tantangan implementasi SAK EMKM di wilayah perbatasan Indonesia, yang menawarkan wawasan kontekstual untuk pengembangan strategi intervensi yang tepat sasaran. Temuan ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif yang melibatkan kemitraan multi-pemangku kepentingan dalam pendidikan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur, yang disesuaikan dengan konteks lokal, untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan implementasi.

Kata kunci: SAK EMKM, UMKM, Kalimantan Barat, pelaporan keuangan, tantangan implementasi.

How to cite: Sihombing, F. M., & Mare, R. N. J. (2025) Tantangan implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kalimantan Barat: Kajian literatur. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(2), 187–203. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i2.1810>



## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2018, kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,34% dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,22% (Muslichah, Sunarto, et al., 2020). Di Kalimantan Barat, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan jumlah mencapai 98,7% dari total unit usaha, namun kontribusi terhadap PDRB hanya sebesar 42,3%, menunjukkan adanya kesenjangan produktivitas yang signifikan (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023).

Kalimantan Barat memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang unik sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sektor UMKM di wilayah ini didominasi oleh usaha perdagangan, pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. Sebagai daerah perbatasan, banyak UMKM di Kalimantan Barat yang terlibat dalam perdagangan lintas batas, baik formal maupun informal. Namun, studi pendahuluan menunjukkan bahwa dari 1.200 UMKM yang terlibat dalam perdagangan lintas batas di Entikong dan Sambas, hanya 12% yang memiliki pencatatan keuangan terstruktur, dan kurang dari 5% yang mampu mengakses pembiayaan formal dari perbankan (Dinas Koperasi dan UKM Kalbar, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam aspek pelaporan keuangan telah menjadi hambatan struktural bagi pengembangan UMKM di daerah perbatasan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016 yang mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2018. SAK EMKM ini dirancang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) agar lebih mudah diimplementasikan oleh UMKM di Indonesia. Standar ini hanya mensyaratkan tiga komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016). Penyederhanaan ini sejalan dengan tren global dalam pengembangan standar akuntansi untuk UMKM, sebagaimana dianalisis oleh Perera dan Chand (2015) yang menekankan pentingnya proportionality dalam desain standar.

Setelah lima tahun implementasi, tingkat adopsi SAK EMKM di Kalimantan Barat masih sangat rendah. Data dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalimantan Barat menunjukkan bahwa hanya 3,2% UMKM yang telah menerapkan SAK EMKM, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 16,7% (Sathvika & Pramitari, 2022). Rendahnya tingkat adopsi ini kontras dengan temuan di provinsi lain seperti Jawa Barat yang mencapai 28% (Wahyuni & Sutomo, 2021) dan DKI Jakarta yang mencapai 35% (Hasanah et al., 2018). Disparitas regional ini mengindikasikan adanya faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi, konsisten dengan temuan Rudiantoro dan Siregar (2012) tentang pentingnya karakteristik regional dalam adopsi standar akuntansi.

Beberapa studi telah mengidentifikasi tantangan umum implementasi SAK EMKM di Indonesia, seperti keterbatasan pengetahuan akuntansi (Maseko & Manyani, 2011), persepsi kompleksitas standar (Muslichah, Sunarto, et al., 2020), dan keterbatasan sumber daya (Sathvika & Pramitari, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan di daerah perkotaan atau wilayah dengan infrastruktur yang relatif baik. Sementara itu, konteks spesifik daerah perbatasan dengan karakteristik keterisolasian geografis, disparitas infrastruktur, dan dinamika ekonomi lintas batas belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam literatur akademik.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi dalam kajian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, belum adanya studi komprehensif yang menganalisis tantangan implementasi SAK EMKM dalam konteks daerah perbatasan Indonesia, khususnya yang mempertimbangkan faktor-faktor unik seperti perdagangan lintas batas, keterisolasian geografis, dan disparitas infrastruktur. Kedua, kurangnya penelitian yang mengeksplorasi bagaimana karakteristik sosio-ekonomi dan budaya lokal di daerah perbatasan mempengaruhi penerimaan dan implementasi standar akuntansi. Ketiga, terbatasnya kajian yang mengevaluasi efektivitas pendekatan sosialisasi dan pendampingan SAK EMKM yang telah dilakukan di daerah dengan aksesibilitas terbatas seperti Kalimantan Barat.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apa saja tantangan spesifik yang dihadapi UMKM di Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan dalam mengimplementasikan SAK EMKM? (2) Bagaimana karakteristik geografis, sosio-ekonomi, dan infrastruktur daerah perbatasan mempengaruhi proses adopsi SAK EMKM? (3) Strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAK EMKM di daerah perbatasan dengan mempertimbangkan konteks lokal?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi UMKM di Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya SAK EMKM, melalui pendekatan kajian literatur yang komprehensif. Dengan fokus pada konteks daerah perbatasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur akuntansi UMKM di daerah dengan karakteristik khusus, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran untuk meningkatkan adopsi SAK EMKM di daerah perbatasan Indonesia.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Profil dan Dinamika UMKM di Kalimantan Barat

UMKM di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan jumlah UMKM dari 198.450 unit pada tahun 2018 menjadi 245.000 unit pada tahun 2023, atau rata-rata pertumbuhan 4,3% per tahun (BPS Kalbar, 2023). Namun, pertumbuhan kuantitas ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan usaha. Studi komparatif oleh Sudaryono et al. (2020) menemukan bahwa

produktivitas UMKM di Kalimantan Barat hanya mencapai 62% dari rata-rata nasional, dengan salah satu faktor penyebab utama adalah lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.

Karakteristik geografis Kalimantan Barat sebagai provinsi perbatasan menciptakan dinamika ekonomi yang unik. Kompleksitas perdagangan lintas batas mempersulit praktik pencatatan keuangan UMKM. Studi etnografi Smallbone dan Welter (2012) yang menganalisis kompleksitas kewirausahaan lintas batas dan menemukan bahwa perbedaan sistem regulasi menciptakan tantangan signifikan dalam standardisasi praktik bisnis.

Faktor sosio-ekonomi dan infrastruktur di Kalimantan Barat juga membentuk karakteristik unik UMKM di wilayah ini. Dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 67,32 yang berada di bawah rata-rata nasional 72,91 (BPS, 2023), tingkat literasi keuangan pelaku UMKM menjadi tantangan struktural. Penelitian longitudinal oleh Ary (2025) selama periode 2018-2021 menunjukkan korelasi kuat antara tingkat pendidikan pelaku usaha dengan kesiapan adopsi standar akuntansi. Di Kalimantan Barat, dimana 64% pelaku UMKM hanya berpendidikan SMP atau lebih rendah, hambatan kognitif menjadi lebih signifikan dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Sintesis dari berbagai studi menunjukkan bahwa profil UMKM di Kalimantan Barat tidak dapat dipisahkan dari konteks geografis dan sosio-ekonominya. Berbeda dengan temuan di daerah perkotaan seperti, dimana tantangan utama adalah persepsi kompleksitas standar, di Kalimantan Barat tantangan lebih bersifat struktural dan sistemik. Karakteristik ini mengindikasikan perlunya pendekatan implementasi SAK EMKM yang disesuaikan dengan konteks lokal, bukan sekadar replikasi model yang berhasil di daerah lain.

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)**

SAK EMKM yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI pada tahun 2016 merupakan respons terhadap kebutuhan UMKM akan pedoman akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP (IAI, 2016). Pengembangan SAK EMKM sejalan dengan tren global simplifikasi standar untuk UMKM, sebagaimana dianalisis oleh Kılıç et al. (2016) yang menekankan pentingnya kesiapan entitas dalam mengadopsi standar yang disederhanakan. Studi komparatif oleh Aboagye-Otchere dan Agbeibor (2012) tentang IFRS for SMEs di Ghana menunjukkan bahwa meskipun standar telah disederhanakan, tantangan implementasi tetap signifikan di negara berkembang.

Karakteristik utama SAK EMKM telah didokumentasikan secara ekstensif dalam literatur. Ningtyas & Vania (2022) mengidentifikasi tiga komponen utama laporan keuangan SAK EMKM: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Simplifikasi ini kontras dengan SAK ETAP yang mensyaratkan lima komponen laporan keuangan (Lutfiaazahra, 2019). Penggunaan biaya historis sebagai dasar pengukuran, sebagaimana dianalisis oleh Kusuma dan Lutfiany (2018), dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas valuasi yang sering menjadi hambatan bagi UMKM.

Penyederhanaan dalam SAK EMKM terlihat dari tidak diwajibkannya penyusunan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Namun, evaluasi terhadap implementasi standar ini menunjukkan hasil yang belum optimal. Muslichah et al. (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa "*an unexpected finding from this study is that most of the Muslim owners are unaware of Standard for SMEs,*" mengindikasikan masih rendahnya awareness terhadap standar ini. Temuan serupa dikemukakan oleh Wahyuni dan Sutomo (Wahyuni & Sutomo, 2021) yang menunjukkan bahwa tingkat implementasi SAK EMKM di Kabupaten Bogor hanya mencapai 30%, meskipun wilayah tersebut memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan pelatihan dibandingkan daerah terpencil.

Perbandingan dengan implementasi standar UMKM di negara lain menunjukkan pola yang menarik. Gonçalves et al. (2022) dalam studinya tentang implementasi IFRS for SMEs di Brasil menemukan bahwa faktor-faktor institusional dan dukungan pemerintah memainkan peran krusial dalam adopsi standar. Sementara itu, Bonito dan Pais (2018) mengidentifikasi bahwa determinan makroekonomi seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi adopsi standar akuntansi UMKM. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi SAK EMKM tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi dan institusional yang lebih luas.

Temuan oleh Albu et al. (2011) dalam konteks implementasi IAS/IFRS di Romania, yang menemukan bahwa transisi dari praktik akuntansi tradisional ke standar modern memerlukan perubahan fundamental dalam mindset pelaku usaha. Di Kalimantan Barat, dengan dominasi usaha keluarga, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena pencampuran keuangan dianggap sebagai bentuk trust dalam bisnis keluarga.

Evaluasi terhadap efektivitas SAK EMKM menunjukkan hasil yang beragam. Putra (2018) menemukan bahwa UMKM yang berhasil mengimplementasikan SAK EMKM mengalami peningkatan akses permodalan sebesar 45%. Namun, López dan Hiebl (2015) dalam *systematic review* mereka tentang manajemen akuntansi di UMKM menemukan bahwa adopsi standar formal tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja, terutama ketika tidak disertai dengan perubahan dalam praktik manajemen. Disparitas ini mengindikasikan adanya gap antara initial adoption dan sustained implementation, konsisten dengan temuan Guerreiro et al. (2012) tentang pentingnya institutional logics dalam mendukung adopsi standar.

Sintesis terhadap karakteristik dan implementasi SAK EMKM menunjukkan adanya kesenjangan antara desain standar dengan realitas di lapangan. Meskipun telah disederhanakan, tantangan implementasi tetap signifikan, terutama di daerah dengan karakteristik khusus seperti Kalimantan Barat. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan implementasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal.

### **Tantangan Implementasi Standar Akuntansi pada UMKM**

Berdasarkan sintesis terhadap 31 artikel yang dianalisis, tantangan implementasi standar akuntansi pada UMKM dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama: internal, eksternal, dan kontekstual. Kategorisasi ini dikembangkan berdasarkan framework

yang diajukan oleh Judge et al. (2010) tentang perspektif institusional dalam adopsi standar internasional.

### ***Tantangan Internal: Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya***

Keterbatasan pengetahuan akuntansi merupakan hambatan paling konsisten yang dilaporkan lintas studi. Maseko dan Manyani (Maseko & Manyani, 2011) menemukan bahwa Sebagian besar UKM tidak melakukan pencatatan akuntansi secara lengkap karena minimnya pengetahuan akuntansi. Temuan ini dikonfirmasi oleh beberapa penelitian di berbagai konteks, Amoako (2013) di Ghana melaporkan bahwa 68% UMKM tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai, sementara Karadag (2015) mengidentifikasi "*poor financial management*" sebagai salah satu penyebab utama kegagalan bisnis UMKM. Di Indonesia, Andriani et al. (2023) melaporkan 76% UMKM tidak memiliki pemahaman dasar akuntansi.

Persepsi terhadap kompleksitas dan relevansi akuntansi menciptakan hambatan psikologis yang signifikan. Karadag (Karadag, 2015) dalam analisis strategisnya menemukan bahwa UMKM seringkali memandang financial management sebagai beban daripada strategic tool. Temuan ini diperkuat oleh Ismail dan King (2007) yang mengidentifikasi misalignment antara sistem informasi akuntansi dengan kebutuhan bisnis UMKM di Malaysia.

Keterbatasan sumber daya menciptakan dilema prioritas bagi UMKM. Barbera dan Hasso (2013) dalam studinya tentang family SMEs menemukan bahwa keputusan untuk menggunakan jasa akuntan profesional berkorelasi positif dengan pertumbuhan penjualan dan survival rate. Namun, analisis *cost-benefit* oleh Broccardo (2014) tentang sistem akuntansi manajemen di UMKM Italia menunjukkan bahwa investasi dalam sistem akuntansi formal memerlukan skala minimum untuk mencapai positive return. Di Kalimantan Barat, dengan dominasi usaha mikro, achieving this minimum scale menjadi tantangan tersendiri.

### ***Tantangan Eksternal: Ekosistem dan Dukungan Institusional***

Keterbatasan dukungan ekosistem menciptakan hambatan struktural untuk implementasi. Awa et al. (2015) dalam *framework* integratif mereka tentang adopsi teknologi oleh UMKM menekankan pentingnya faktor lingkungan. Di Kalimantan Barat, rasio akuntan publik per UMKM hanya 1:5000, dibandingkan dengan Jakarta yang 1:500, menciptakan scarcity dalam akses terhadap keahlian profesional.

Efektivitas program sosialisasi dan pelatihan menunjukkan hasil yang bervariasi. International Kumar & Lakshmi (2023) menekankan bahwa pendekatan manajemen strategis terhadap manajemen keuangan dapat membantu UKM mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Namun, implementasi pendekatan strategis ini memerlukan lebih dari sekadar transfer pengetahuan teknis. Muslichah et al. (2020) menemukan bahwa Sosialisasi saja tidak cukup, perlu pendampingan agar pelaku UKM dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar dengan benar.

Peran lembaga keuangan sebagai demand-side driver menunjukkan paradoks. Ramdani et al. (2013) dalam *technology-organisation-environment* model mereka menemukan bahwa external pressure dari lembaga keuangan dapat mendorong adopsi sistem formal. Namun, di Kalimantan Barat, relationship banking yang dominan justru mengurangi insentif untuk formal financial reporting, karena keputusan kredit lebih didasarkan pada personal relationships daripada financial statements.

### **Tantangan Kontekstual: Karakteristik Geografis dan Sosio-Kultural**

Faktor geografis menciptakan disparitas akses yang signifikan. Spierings dan Van Der Velde (2013) dalam studinya tentang perbedaan lintas batas menemukan bahwa ketidakakraban dengan sistem yang berbeda menciptakan hambatan tambahan. Di Kalimantan Barat, dengan 43% UMKM berlokasi di daerah terpencil, hambatan geografis menjadi sangat signifikan. Biaya transportasi untuk mengikuti pelatihan dapat mencapai 25% dari keuntungan bulanan UMKM mikro di daerah terpencil.

Faktor sosio-kultural menciptakan kompleksitas tambahan. Di Kalimantan Barat, keragaman etnis menciptakan berbagai logika bisnis yang seringkali tidak sesuai dengan asumsi yang mendasari SAK EMKM. Anderson dan Miller (2003) menekankan bahwa "masalah kelas" dalam proses kewirausahaan, dimana sosial dan modal manusia secara signifikan mempengaruhi praktik bisnis.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* dengan mengadopsi framework PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan transparansi dan replikabilitas proses penelaahan literatur. Metode *systematic review* dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis komprehensif terhadap evidensi empiris yang relevan dengan tantangan implementasi SAK EMKM di konteks daerah perbatasan.

#### **Strategi Pencarian dan Sumber Data**

Pencarian literatur dilakukan pada empat database elektronik utama: *Google Scholar*, GARUDA (Garba Rujukan Digital), DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), dan Portal Jurnal Elektronik IAI. Pencarian dilakukan pada periode November 2024 hingga Januari 2025. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris: ("SAK EMKM" OR "standar akuntansi UMKM" OR "*SME accounting standards*") AND ("implementasi" OR "*implementation*" OR "adopsi" OR "adoption") AND ("tantangan" OR "challenges" OR "hambatan" OR "barriers") AND ("Indonesia" OR "Kalimantan Barat" OR "border region" OR "daerah perbatasan").

#### **Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Kriteria inklusi yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup: (1) artikel jurnal *peer-reviewed* yang dipublikasikan antara tahun 2016-2024, dengan pertimbangan bahwa SAK EMKM diterbitkan tahun 2016; (2) penelitian empiris yang membahas implementasi standar akuntansi pada UMKM di Indonesia atau negara berkembang dengan konteks serupa; (3) artikel yang tersedia dalam full-text berbahasa Indonesia atau Inggris; dan (4) studi yang memberikan data atau analisis tentang tantangan implementasi standar akuntansi.

Kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel opini, editorial, atau review yang tidak menyajikan data empiris; (2) tesis, disertasi, dan working papers yang belum melalui peer review; (3) studi yang fokus pada perusahaan besar atau listed companies; dan (4) artikel yang tidak dapat diakses secara penuh atau hanya tersedia dalam bentuk abstrak.

### Proses Seleksi Literatur

Proses seleksi mengikuti diagram alur PRISMA dengan empat tahapan. Tahap identifikasi menghasilkan 287 artikel dari pencarian awal di empat database. Tahap screening dilakukan dengan memeriksa judul dan abstrak, menghasilkan 92 artikel yang potensial relevan. Tahap eligibility melibatkan pembacaan full-text dan penerapan kriteria inklusi-eksklusi secara ketat, menghasilkan 43 artikel. Tahap final inclusion menghasilkan 31 artikel yang memenuhi semua kriteria dan digunakan dalam analisis.



Gambar 1. Proses Seleksi Studi

Dari 31 artikel yang dianalisis, distribusi tahun publikasi menunjukkan tren peningkatan perhatian terhadap topik ini yaitu 2017-2019 (6 artikel), 2020-2021 (11 artikel), dan 2022-2024 (14 artikel). Distribusi geografis studi mencakup yaitu Jawa (12 artikel), Sumatera (6 artikel), Kalimantan (3 artikel), Sulawesi (2 artikel), studi nasional (5 artikel), dan studi komparatif internasional (3 artikel).

### Ekstraksi dan Analisis Data

Ekstraksi data dilakukan menggunakan standardized extraction form yang mencakup: (1) karakteristik bibliografis (penulis, tahun, jurnal); (2) karakteristik metodologis (desain penelitian, sampel, lokasi); (3) temuan utama terkait tantangan implementasi; dan (4) rekomendasi atau implikasi yang diajukan. Data diekstraksi secara independen dan diverifikasi untuk memastikan akurasi.

Analisis data menggunakan pendekatan thematic analysis dengan kombinasi deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan dengan menerapkan kerangka awal berdasarkan kategorisasi tantangan dari literatur sebelumnya (internal, eksternal,

kontekstual). Pendekatan induktif memungkinkan identifikasi tema-tema baru yang muncul dari data. Proses coding dilakukan secara manual melalui tiga tahapan: open coding untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal, *axial coding* untuk menghubungkan konsep dan mengembangkan kategori, dan *selective coding* untuk mengintegrasikan kategori menjadi tema utama.

Proses *coding* menghasilkan 127 kode awal yang kemudian dikelompokkan menjadi 18 sub-tema dan akhirnya dikonsolidasikan menjadi 6 tema utama: (1) kapasitas dan pengetahuan akuntansi; (2) persepsi dan motivasi pelaku UMKM; (3) sumber daya dan infrastruktur; (4) dukungan ekosistem dan institusional; (5) karakteristik geografis dan aksesibilitas; dan (6) faktor sosio-kultural dan praktik lokal.

### Penilaian Kualitas dan Validitas

Kualitas artikel yang diinklusi dinilai menggunakan adaptasi dari *Critical Appraisal Skills Programme (CASP) checklist*. Setiap artikel dinilai berdasarkan: kejelasan tujuan penelitian, ketepatan metodologi, kecukupan ukuran sampel, kedalaman analisis, dan kontribusi terhadap pemahaman topik. Artikel dengan skor kualitas rendah (di bawah 60%) tidak dieksklusi tetapi diberi bobot lebih rendah dalam sintesis.

Validitas analisis dipastikan melalui beberapa mekanisme. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis studi (kuantitatif, kualitatif, *mixed methods*) dan konteks geografis. *Peer debriefing* dilakukan dengan melibatkan dua peneliti independen yang memiliki keahlian dalam akuntansi UMKM untuk mereview hasil *coding* dan interpretasi tema. *Audit trail* didokumentasikan secara lengkap mencakup keputusan-keputusan metodologis, proses coding, dan pengembangan tema.

### Keterbatasan Metodologis

Beberapa keterbatasan metodologis perlu diakui. Pertama, fokus pada publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris mungkin mengeksklusi penelitian relevan dalam bahasa daerah. Kedua, keterbatasan akses terhadap beberapa jurnal berbayar mungkin menciptakan bias publikasi. Ketiga, dominasi studi dari Pulau Jawa dalam literatur yang tersedia mungkin mempengaruhi generalisasi temuan untuk konteks Kalimantan Barat. Keempat, penggunaan *coding* manual tanpa *software* khusus dapat membatasi kompleksitas analisis yang dapat dilakukan.

Meskipun demikian, *systematic review* ini memberikan sintesis komprehensif pertama tentang tantangan implementasi SAK EMKM dengan fokus khusus pada konteks daerah perbatasan. Transparansi metodologis yang diterapkan memungkinkan replikasi dan pengembangan penelitian lebih lanjut.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Sintesis Literatur

Analisis sistematis terhadap 31 artikel yang memenuhi kriteria inklusi menghasilkan pola-pola konsisten dan variasi menarik dalam implementasi SAK EMKM di berbagai konteks. Sintesis ini mengidentifikasi konvergensi dan divergensi temuan yang

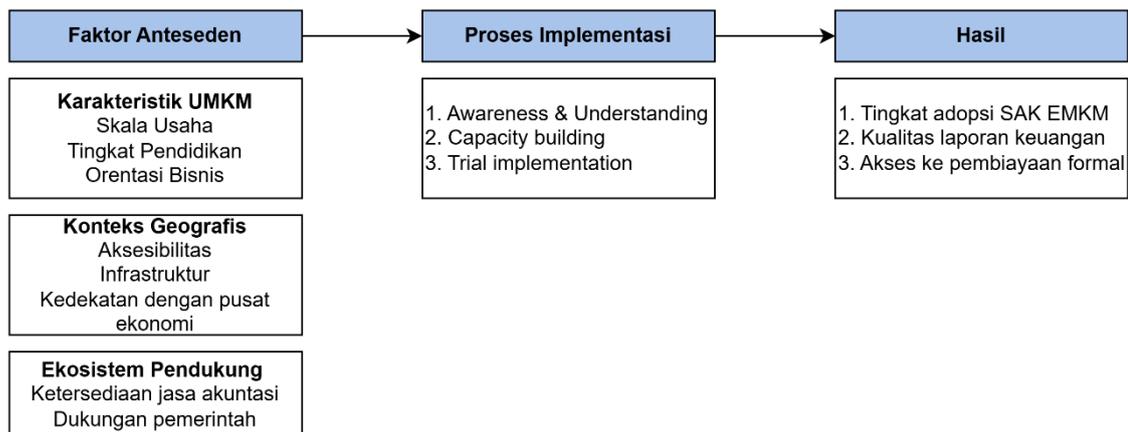
memberikan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas implementasi standar akuntansi untuk UMKM.

Tabel 1. Ringkasan Studi Utama tentang Implementasi SAK EMKM

Peneliti	Lokasi	Metode	Sampel	Temuan Utama	Tingkat Adopsi
Sathvika et al. (2022)	Bali	Mixed Methods	30 UMKM	Rendahnya pemahaman konsep akuntansi; dominasi pencatatan manual	16.7%
Wahyuni & Sutomo (2021)	Bogor	Kuantitatif	100 UMKM	Sosialisasi tidak efektif tanpa pendampingan berkelanjutan	30%
Muslichah et al. (2020)	Multi-lokasi	Kualitatif	45 UMKM Muslim	Kesadaran rendah; konflik dengan praktik tradisional	<20%
Hasanah et al. (2018)	Jakarta	Survey	200 UMKM	Akses ke sumber daya lebih baik tetapi motivasi tetap rendah	35%
Didied et al. (2024)	Jawa Timur	Kuantitatif	150 UMKM	Faktor budaya dan dukungan komunitas signifikan	25%

Sintesis mengungkap tiga pola utama yang konsisten studi lintas batas, yaitu:

1. terdapat kesenjangan persepsi yang fundamental antara pembuat kebijakan dan pelaku UMKM mengenai urgensi standar akuntansi. Sementara regulator menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, pelaku UMKM lebih fokus pada survival dan pertumbuhan jangka pendek.
2. tingkat adopsi menunjukkan korelasi negatif dengan jarak geografis dari pusat ekonomi, mengindikasikan adanya spatial inequality dalam difusi inovasi akuntansi.
3. pendekatan *one-size-fits-all* dalam implementasi terbukti tidak efektif mengingat heterogenitas karakteristik UMKM.



Gambar 2. Framework Konseptual Tantangan Implementasi SAK EMKM

Analisis komparatif menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat adopsi berdasarkan konteks geografis dan sektoral. Studi di wilayah urban (Jakarta, Surabaya) melaporkan tingkat adopsi 30-35%, sementara wilayah rural dan perbatasan menunjukkan angka di bawah 10%. Perbedaan ini tidak dapat dijelaskan semata oleh

faktor pendidikan atau akses informasi. Sebaliknya, analisis mendalam mengindikasikan bahwa *institutional logic* yang berbeda antara konteks urban dan rural menciptakan reception environment yang fundamental berbeda untuk inovasi akuntansi.

Temuan kontradiktif muncul dalam hal efektivitas intervensi. Sementara Wahyuni dan Sutomo (2021) menemukan bahwa sosialisasi intensif tidak signifikan meningkatkan adopsi, Didied et al. (2024) melaporkan bahwa pendampingan berbasis komunitas menunjukkan hasil positif. Kontradiksi ini dapat dijelaskan melalui lensa *social capital theory* dimana intervensi berhasil ketika tertanam dalam struktur sosial yang telah ada, tetapi gagal ketika imposed dari luar tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

Sintesis juga mengidentifikasi tema yang muncul dan tidak diantisipasi dalam desain SAK EMKM yaitu *digital divide*. Studi-studi terbaru (2022-2024) konsisten menunjukkan bahwa UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital untuk operasional (*e-commerce, digital payment*) lebih receptive terhadap standar akuntansi formal. Ini mengindikasikan bahwa digitalisasi mungkin menjadi enabler kritis yang selama ini diabaikan dalam strategi implementasi.

#### **4.2. Pembahasan**

Temuan sintesis ini dapat dianalisis melalui beberapa lensa teoretis yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kompleksitas implementasi SAK EMKM.

##### **Institutional Theory dan Legitimacy Gap**

Melalui perspektif *institutional theory* (Dimaggio & Powell, 2021), rendahnya adopsi SAK EMKM dapat dipahami sebagai manifestasi dari decoupling antara struktur formal dan praktik aktual. Analisis institusional oleh Guerreiro et al. (Guerreiro et al., 2012) dalam konteks adopsi IFRS di Portugal mengidentifikasi bahwa institutional logics memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan adopsi. Di Kalimantan Barat, terdapat konflik antara logika institusional formal (yang menekankan standardisasi dan transparansi) dengan logika institusional informal (yang menekankan fleksibilitas dan *relationship-based trust*).

Judge et al. (Judge et al., 2010) dalam analisis lintas negara mereka menemukan bahwa kekuatan institusi nasional pengaruh yang signifikan tingkat adopsi standar internasional. Namun, di konteks daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, kompleksitas meningkat karena exposure terhadap multiple institutional systems. UMKM yang terlibat dalam perdagangan lintas batas harus navigate antara sistem Indonesia dan Malaysia, menciptakan kompleksitas kelembagaan yang tidak diantisipasi dalam desain SAK EMKM.

Kesenjangan legitimasi yang teridentifikasi memiliki multiple dimensions. Sementara SAK EMKM dirancang untuk memberikan legitimasi eksternal (terutama untuk akses permodalan), pelaku UMKM lebih memprioritaskan legitimasi internal dalam komunitas bisnis lokal mereka. Temuan ini konsisten dengan Kılıç et al. (Kılıç

et al., 2016) yang menemukan bahwa kesiapan untuk adopsi standar tidak hanya teknis tetapi juga cultural dan institutional.

### **Resource-Based View dan Dynamic Capabilities**

Aplikasi *Resource-Based View* (Barney, 1991) yang dielaborasi untuk konteks UMKM oleh Ismail dan King (2014) mengungkap bahwa tantangan bukan hanya pada ketersediaan sumber daya, tetapi lebih pada orkestasi sumber daya. UMKM yang berhasil mengadopsi SAK EMKM bukan perlu yang memiliki sumber daya terbanyak, tetapi yang mampu mengkonfigurasi ulang sumber daya existing untuk menciptakan kapabilitas baru.

Barbera dan Hasso (Barbera & Hasso, 2013) dalam studinya tentang UMKM menemukan bahwa keputusan untuk menggunakan jasa akuntan profesional terlindungi secara positif dengan pertumbuhan penjualan dan manfaat kelangsungan hidup. Namun, di Kalimantan Barat dengan keterbatasan akses terhadap profesional akuntansi, UMKM harus mengembangkan kemampuan internal. Karadag (2015) menekankan bahwa manajemen keuangan strategis tidak hanya memerlukan keterampilan teknis tetapi juga pemikiran strategis yang sering kali tidak ada dalam UMKM tradisional.

Kerangka kemampuan dinamis (Teece et al., 1997) memberikan wawasan bahwa implementasi SAK EMKM tidak hanya memerlukan kemampuan teknis tetapi juga kemampuan penginderaan (mengenali nilai strategi akuntansi), kemampuan merebut (mengalokasikan sumber daya untuk implementasi), dan kemampuan mengkonfigurasi ulang (mengintegrasikan praktik akuntansi dalam pemerataan bisnis). Kumar & Lakshmi (2023) memperkuat argumen ini dengan menekankan perlunya “pendekatan manajemen strategis” yang komprehensif.

### **Technology Acceptance Model dan Digital Transformation**

Tema yang muncul tentang kesenjangan digital dapat dijelaskan melalui kerangka kerja yang dikembangkan oleh Awa et al. (2015) yang mengintegrasikan kerangka TAM, TPB, dan TOE. UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital telah melalui learning curve dalam menerima inovasi, menjadikan mereka lebih reseptif terhadap inovasi berikutnya seperti SAK EMKM.

Ramdani et al. (2013) dalam model teknologi-organisasi-lingkungan mereka menemukan bahwa kesiapan organisasi merupakan faktor kunci dalam penerapan aplikasi perusahaan oleh UMKM. Di konteks Kalimantan Barat, infrastruktur digital yang terbatas menciptakan hambatan tambahan. Namun, UMKM yang berhasil mengatasi kesenjangan digital menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk menerapkan SAK EMKM, yang menunjukkan bahwa digitalisasi dan formalisasi akuntansi mungkin saling memperkuat proses.

### **Social Capital Theory dan Community-Based Approach**

Keberhasilan relatif dari pendampingan berbasis komunitas dapat dijelaskan melalui perspektif yang dikembangkan oleh Anderson dan Miller (Anderson & Miller, 2003) tentang pentingnya modal manusia dan sosial dalam kewirausahaan. Jayasinghe et al. (2008) dengan framework terikat emosionalitas mereka menunjukkan bahwa

keputusan bisnis dalam UMKM tidak murni rasional tetapi tertanam dalam konteks emosional dan sosial.

Di Kalimantan Barat, dimana struktur sosial sering kali diorganisir berdasarkan ikatan etnis dan kekerabatan, memanfaatkan modal sosial yang ada menjadi suatu keharusan. Smallbone dan Welter (Smallbone & Welter, 2012) dalam analisis kewirausahaan lintas batas mereka menemukan bahwa jaringan sosial memainkan peran penting dalam mengatasi kekosongan kelembagaan. Hal ini menyarankan bahwa implementasi SAK EMKM harus dirancang untuk bekerja dengan, bukan melawan, struktur sosial yang ada.

### **Teori Kompleksitas dan Implementasi Adaptif**

Melihat implementasi SAK EMKM melalui lensa teori kompleksitas mengungkap bahwa sistem UMKM merupakan sistem adaptif yang kompleks dimana intervensi linier tidak menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. López dan Hiebl (López & Hiebl, 2015) dalam tinjauan komprehensif mereka tentang akuntansi manajemen di UMKM menekankan perlunya memahami faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi adopsi dan implementasi.

Broccardo (Broccardo, 2014) menemukan bahwa sistem akuntansi manajemen di UMKM Italia berkembang secara organik daripada melalui implementasi yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan implementasi yang kaku yang mengasumsikan proses adopsi rasional mungkin memiliki kelemahan mendasar. Sebaliknya, pendekatan adaptif yang memungkinkan bersifat local

### **Sintesis Teoretis dan Proposisi**

Integrasi *multi-teoretis* ini menghasilkan beberapa proposisi kunci untuk konteks Kalimantan Barat:

- Proposisi 1 : Implementasi SAK EMKM akan lebih berhasil jika diselaraskan dengan logika kelembagaan yang ada dibandingkan ketika mencoba menggantikannya
- Proposisi 2 : Pengembangan kemampuan internal lebih berkelanjutan daripada ketergantungan pada layanan profesional eksternal dalam konteks lingkungan dengan sumber daya terbatas
- Proposisi 3 : Transformasi digital dapat berfungsi sebagai pintu gerbang untuk proses formalisasi yang lebih luas, termasuk penerapan standar akuntansi
- Proposisi 4 : Pendekatan berbasis komunitas yang memanfaatkan modal sosial yang ada akan lebih efektif dibandingkan intervensi yang berfokus pada individu
- Proposisi 5 : Penerapan adaptif yang memungkinkan variasi lokal akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pendekatan standar

Untuk analisis konteks Kalimantan Barat, analisis mengimplikasikan perlunya pemikiran ulang mendasar tentang bagaimana SAK EMKM diimplementasikan. Daripada memandang karakteristik daerah perbatasan sebagai hambatan yang harus diatasi, pendekatan yang lebih produktif dengan memahami bagaimana standar dapat

diadaptasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kompleksitas perdagangan lintas batas, keragaman etnis, dan keterbatasan infrastruktur tidak selalu menjadi hambatan tetapi dapat menjadi sumber solusi inovatif jika dipahami dan dimanfaatkan dengan benar.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi SAK EMKM di Kalimantan Barat menghadapi tantangan multidimensional yang melampaui persoalan teknis akuntansi. Sintesis literatur mengungkap tiga temuan kunci yaitu kesenjangan fundamental antara desain standar dengan realitas UMKM di daerah perbatasan; kegagalan pendekatan *one-size-fits-all* dalam mengakomodasi heterogenitas konteks lokal; dan peran kritis digital transformation sebagai enabler yang selama ini diabaikan dalam strategi implementasi.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa rendahnya penerapan SAK EMKM bukan semata cerminan keterbatasan kapasitas, melainkan manifestasi dari ketidaksesuaian logika institusional antara standar formal dengan praktik bisnis yang tertanam dalam struktur sosial lokal. Temuan ini menantang asumsi kebijakan yang ada dan mengindikasikan perlunya perubahan paradigma dari penerapan standar menuju pendekatan adaptif, berbasis tempat yang mengintegrasikan agenda digitalisasi dengan peningkatan kapasitas akuntansi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka kerja komprehensif untuk memahami kompleksitas implementasi standar akuntansi di daerah dengan karakteristik khusus. Untuk Kalimantan Barat dan daerah perbatasan lainnya, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi strategi harus berkembang dari kondisi lokal, bukan direplikasi dari model yang berhasil di tempat lain. Urgensi reformulasi kebijakan menjadi keharusan mengingat peran strategis UMKM dalam ekonomi regional dan potensi yang belum terealisasi akibat hambatan sistemik dalam pelaporan keuangan. Tanpa perubahan mendasar dalam pendekatan implementasi, perpaduan antara aspirasi kebijakan dengan kenyataan lapangan akan terus melebar, menghambat pengembangan UMKM dan inklusi keuangan di daerah perbatasan Indonesia.

## Referensi

- Aboagye-Otchere, F., & Agbeibor, J. (2012). The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMES). *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 10(2), 190–214. <https://doi.org/10.1108/19852511211273723>
- Albu, N., Nicolae Albu, C., Bunea, Ș., Artemisa Calu, D., & Mădălina Girbina, M. (2011). A story about IAS/IFRS implementation in Romania. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 1(1), 76–100. <https://doi.org/10.1108/20421161111107868>
- Amoako, G. K. (2013). Accounting Practices of SMEs: A Case Study of Kumasi Metropolis in Ghana. *International Journal of Business and Management*, 8(24), 73–83. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n24p73>
- Anderson, A. R., & Miller, C. J. (2003). “Class matters”: Human and social capital in

- the entrepreneurial process. *Journal of Socio-Economics*, 32(1), 17–36. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(03\)00009-X](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(03)00009-X)
- Andriani, R., Disman, D., Ahman, E., & Santoso, B. (2023). Empirical Effects of Work Environment, Job Satisfaction and Work Engagement on Turnover Intention in Hospitality Industry. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(1), 129–140. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.1.129>
- Ary, W. W. (2025). Women ' s financial literacy , inclusion , digital finance , and cultural value : an ethnography study in West Kalimantan. *Manajemen Dan Bisnis*, 24(1), 78–89. <https://doi.org/10.24123/mabis.v24i1.874>
- Awa, H. O., Ojibabo, O. U., & Emecheta, B. C. (2015). Integrating TAM, TPB and TOE frameworks and expanding their characteristic constructs for e-commerce adoption by SMEs. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 6(1), 76–94. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-04-2014-0012>
- Barbera, F., & Hasso, T. (2013). Do We Need to Use an Accountant? The Sales Growth and Survival Benefits to Family SMEs. *Family Business Review*, 26(3), 271–292. <https://doi.org/10.1177/0894486513487198>
- Barney, J. (1991). Journal of Management. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bonito, A., & Pais, C. (2018). The macroeconomic determinants of the adoption of IFRS for SMEs. *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 21(2), 116–127. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2018.03.001>
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2023). *Kalimantan Barat Dalam Angka 2023*.
- Broccardo, L. (2014). Management Accounting System in Italian Smes : Some. *Advances in Management & Applied Economics*, 4(4), 1–16.
- Didied, N. M., Rahman, A., & Kholid, M. N. (2024). Determinants: implementation of SAK EMKM financial accounting standards for MSMEs. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 13(5), 684–697. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i5.3498>
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (2021). the Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *The New Economic Sociology: A Reader*, January 1983, 111–134. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Gonçalves, F. J. A., De Moura, A. A. F., & Motoki, F. Y. S. (2022). What influences the implementation of IFRS for SMEs? The Brazilian case. *Accounting and Finance*, 62(2), 2947–2992. <https://doi.org/10.1111/acfi.12917>
- Guerreiro, M. S., Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2012). Voluntary adoption of International Financial Reporting Standards by large unlisted companies in Portugal - Institutional logics and strategic responses. *Accounting, Organizations and Society*, 37(7), 482–499. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.05.003>
- Hasanah, N., Anggraini, R., & Purwohedi, U. (2018). Accounting standards: The lessons from small and medium enterprises. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(5), 1–10.
- Ismail, N. A., & King, M. (2007). Factors influencing the alignment of accounting information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms.

- Journal of Information Systems and Small Business*, 1(1), 1–20.
- Judge, W., Li, S., & Pinsker, R. (2010). National adoption of international accounting standards: An institutional perspective. *Corporate Governance: An International Review*, 18(3), 161–174. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2010.00798.x>
- Karadag, H. (2015). Financial Management Challenges In Small And Medium-Sized Enterprises: A Strategic Management Approach. *EMAJ: Emerging Markets Journal*, 5(1), 26–40. <https://doi.org/10.5195/emaj.2015.67>
- Kılıç, M., Uyar, A., & Ataman, B. (2016). Preparedness of the entities for the IFRS for SMEs: an emerging country case. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(2), 156–178. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2014-0003>
- Kumar, R., & Lakshmi. (2023). Financial Management Challenges In Small And Medium-Sized Enterprises: A Strategic Management Approach. *International Journal of Research (IJR)*, 5(1), 26–40. <https://doi.org/10.5195/emaj.2015.67>
- Kusuma, I. C., & Lutfiany, V. (2018). Persepsi UMKM dalam Memahami SAK EMKM. *Jurnal Akunida*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1550>
- López, O. L., & Hiebl, M. R. W. (2015). Management accounting in small and medium-sized enterprises: Current knowledge and avenues for further research. *Journal of Management Accounting Research*, 27(1), 81–119. <https://doi.org/10.2308/jmar-50915>
- Lutfiaazahra. (2019). *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM Pengrajin Batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sebelah Maret.
- Maseko, N., & Manyani, O. (2011). Accounting practices of SMEs in Zimbabwe: An investigative study of record keeping for performance measurement (A case study of Bindura). *Journal of Accounting and Taxation*, 3(8). <https://doi.org/10.5897/jat11.031>
- Muslichah, M., Abdullah, R., & Abdul Razak, L. (2020). The Effect of Halal Foods Awareness on Purchase Decision with Religiosity As A Moderating Variable: A Study Among University Students in Brunei Darussalam. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1091–1104. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2017-0102>
- Muslichah, M., Sunarto, S., Kusnanto, A. A., Indrawati, S., & Hariyanto, H. (2020). The Adoption of Financial Accounting Standards for Small Medium Enterprises by Muslim Entrepreneurs. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 27(2), 54. <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v27i2.692>
- Ningtyas, M. N., & Vania, A. (2022). Materialism, Financial Literacy, and Online Impulsive Buying: A Study on the Post Millennial Generation in a Pandemic Period. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v15i1.33774>
- Perera, D., & Chand, P. (2015). Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES). *Advances in Accounting*, 31(1), 165–178. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2015.03.012>
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan*

- Perpajakan*, 11(2), 2086–7662. <https://doi.org/DOI: 10.22441/profita.v11.02.004>
- Ramdani, B., Chevers, D., & Williams, D. A. (2013). SMEs' adoption of enterprise applications: A technology-organisation-environment model. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(4), 735–753. <https://doi.org/10.1108/JSBED-12-2011-0035>
- Sathvika, N. K. D., & Pramitari, I. (2022). Analysis of Implementation of SAK EMKM on the Preparation of MSME Financial Reports in Dalung Village Kuta Utara District Badung Regency. *Repositori Politeknik Negeri*, 1–5.
- Smallbone, D., & Welter, F. (2012). Cross-border entrepreneurship. *Entrepreneurship and Regional Development*, 24(3–4), 95–104. <https://doi.org/10.1080/08985626.2012.670907>
- Spierings, B., & van der Velde, M. (2013). Cross-Border Differences and Unfamiliarity: Shopping Mobility in the Dutch-German Rhine-Waal Euroregion. *European Planning Studies*, 21(1), 5–23. <https://doi.org/10.1080/09654313.2012.716236>
- Sudaryono, Rahardja, U., & Lutfiani, N. (2020). The Strategy of Improving Project Management Using Indicator Measurement Factor Analysis (IMF) Method. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(3). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1477/3/032023>
- Teece, D. J., Pisan, G., & Shuen, A. M. Y. (1997). *Management*. 18(March), 509–533.
- Wahyuni, I., & Sutomo, H. (2021). the Effectiveness of Implementation of Sak Emkm To Increase Access To Banking Capital on Msmes in Bogor Regency. *Riset*, 3(2), 489–500. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i2.102>